

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DISTRIK KANGGIME KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA

**Oleh
Nuwen Wenda¹**

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah. Karena pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect yang sangat besar terutama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan infrastruktur sebenarnya tidak semata tanggung jawab pemerintah, namun juga memerlukan keterlibatan masyarakat secara langsung. Keterlibatan masyarakat itu diharapkan akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap infrastruktur yang dibangun dan tentunya harapan selanjutnya mereka akan memelihara dan menjaganya. Namun masih banyak dalam pembangunan infrastruktur keterlibatan masyarakat masih minim. Hal itu disebabkan karena pemerintah kurang melibatkan masyarakat atau masyarakatnya yang tidak mau terlibat. Untuk itu penelitian ini mengidentifikasi permasalahan terkait keterlibatan masyarakat hasil di distrik Kanggime kabupaten Tolikara dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Dari hasil penelitian diidentifikasi bahwa minimnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur banyak disebabkan ketidakpercayaan mereka terhadap pemimpin mereka dan juga terhadap wakil mereka yang duduk di kursi legislative karena merasa sering dibohongi. Selain itu juga disebabkan karena seringkali program pembangunan yang ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Infrastruktur

COMMUNITY POLITICAL PARTICIPATION IN DEVELOPING KANGGIME DISTRICT INFRASTRUCTURE, TOLIKARA DISTRICT, PAPUA PROVINCE

**By
Nuwen Wenda**

ABSTRACT

Infrastructure development is one of the obligations of the government. Because infrastructure development has a very large multiplier effect, especially for improving the welfare of the community. However, infrastructure development is not only the responsibility of the government, but also requires direct community involvement. It is hoped that community involvement will

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

foster a sense of belonging to the infrastructure being built and of course hope that in the future they will maintain and maintain it. However, there is still a lot of community involvement in infrastructure development. This is because the government does not involve the community or society who do not want to be involved. For this reason, this study identifies problems related to the involvement of the results community in Kanggime district, Tolikara district in infrastructure development in the region. From the research results, it is identified that the lack of community participation in infrastructure development is largely due to their distrust of their leaders and also to their representatives who sit in the legislative seats because they feel they are often cheated. In addition, it is also caused by the fact that the development programs that are set do not match what they want.

Keywords: Community Participation; Infrastructure Development

PENDAHULUAN

Partisipasi politik seharusnya berlangsung secara alamiah dalam suatu masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya partisipasi politik yang diusahakan secara sadar dan terencana yang bersumber dari aspirasi yang digali dari kepribadian, bangsa Indonesia sendiri dan disepakati secara nasional. Partisipasi politik yang demikian jelas akan menunjang terpeliharanya stabilitas nasional memperlancar upaya pencapaian cita-cita bangsa.

Dengan demikian dapat diperkirakan dan diharapkan bahwa Partisipasi politik yang baik akan dapat mengatasi segala kemungkinan bahaya dan ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Partisipasi politik yang dimaksud disini adalah keseluruhan untuk mematangkan mekanisme yang mengatur bagaimana keputusan politik atau kebijaksanaan umum dirumuskan dan ditetapkan. Demokrasi Pancasila yang mempunyai pengertian secara berikut :“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa. Yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersatu persatuan Indonesia, dan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dengan memadukan pengertian diatas, maka secara umum Partisipasi politik merupakan bagian dari sistem politik Demokrasi Pancasila yang dapat diartikan sebagai suatu mekanisme melalui mana setiap keputusan politik atau kebijaksanaan umum diatur, dirumuskan dan ditetapkan dengan mengikut sertakan masyarakat melalui wakil-wakilnya serta menganut asas musyawarah untuk mufakat. Sistem Demokrasi Pancasila dalam setiap kegiatannya ini diharapkan akan tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila secara utuh.

Sebagai usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi politik dapat ditempuh melalui pendidikan politik, karena pendidikan politik bermaksud untuk meningkatkan kesadaran setiap warga negara termasuk dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara. Landasan umum dalam rangka memantapkan pembangunan bagi segenap masyarakat Indonesia demi terciptanya suasana dan harapan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pendidikan politik yang dilakukan secara sadar dan berencana pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Hal ini menunjukkan bahwa generasi masyarakat adalah tonggak bangsa Indonesia, sehingga merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itulah sebabnya pendidikan politik sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran tanggung jawab sehingga akan mendorong dan mengembangkan serta meningkatkan partisipasi politik dalam usaha-usaha pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan.

Partisipasi politik masyarakat juga secara langsung dapat mempengaruhi kinerja dari pemerintah. Hal ini jelas dapat dilihat dari kepedulian masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Apabila masyarakat bersikap apatis atau acuh tak acuh terhadap kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah, maka hal ini akan mengakibatkan kinerja dari pemerintah buruk. Implementasi kebijakan adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktik. Orang sering beranggapan bahwa implementasi hanya merupakan pelaksanaan apa yang diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataan dapat dilihat sendiri bahwa betapapun baiknya rencana yang telah dibuat tetapi tidak ada gunanya apabila itu dilaksanakan dengan baik dan benar.

Pemerintah Daerah Distrik Kanggime Kabupaten Tolikara, memiliki program pembangunan infrastruktur seperti sarana dan prasarana umum yang masih kurang, seperti :

- a) Dibidang kesehatan, misalnya pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan;
- b) Dibidang pendidikan, misalnya pembangunan sekolah dan perpustakaan;
- c) Dibidang transportasi, melakukan pembangunan jalan aspal, dari Kabupaten/Kota, ke-setiap Distrik dan masuk kekampung-kampung.
- d) Selain itu juga Penerangan dan air bersih.

Namun saat ini kehidupan warga masyarakat di Distrik Kanggime kondisi dan keadaan masih belum membaik, sebagai akibat pembangunan pada kenyataannya belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu penyebab hal tersebut adalah minimnya partisipasi masyarakat. Itulah sebabnya partisipasi politik masyarakat yang harus diartikulasikan kepentingan suatu proses pengiputan berbagai kebutuhan, dan tuntutan kepentingan melalui Kepala Suku adat dan juga Wakil-Wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar supaya kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompok dapat terwakili dan terlindungi dalam kebijaksanaan pemerintah menjadi sesuatu yang penting.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Partisipasi Politik

Partisipasi politik menurut Nelson di kutip Ndraha (2011;102), mengatakan bahwa partisipasi itu ada dua jenis yaitu :

1. Partisipasi Horisontal, adalah partisipasi sesama warga atau anggota suatu perkumpulan.
2. Partisipasi Vertikal, adalah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan. Antara klien dengan patron atau antara masyarakat sebagai perkumpulan dengan pemerintah.

Dalam menemukan makna yang lengkap, maka yang hampir sama dengan pendapat di atas adalah tindakan sosial atau seperti yang disebut oleh weber sebagai sosial-action. Istilah ini dikemukakan oleh Weber untuk perbuatan manusia yang mempunyai arti subyektif . Dengan ini dimaksudkan setiap orang dalam mencapai tujuan terdorong oleh motivasi yang menguntungkan.

Menurut Budiardjo (1982:15), secara umum partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara serta secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah. Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum.

Mengenai konsep partisipasi politik di Indonesia masih perlu di teliti kembali, sebab tidak dapat dibedakan aktifitas politik yang bertolak dari inisiatif seseorang atau yang bersifat spontan. Stabilitas politik dan pembangunan adalah kebijaksanaan dasar yang amat mempengaruhi bentuk dan corak partisipasi politik selama ini. Masyarakat belum dapat menilai apakah keterlibatan mereka didalam proses politik adalah memenuhi keperluan mereka sendiri atau melayani kebutuhan elite politik dan

penguasa. Maka untuk itu, mobilisasi politik diartikan sebagai partisipasi politik. Sehingga perlu dicari padangan kata yang sesuai yaitu peran serta yang mengandung arti terlibat tanpa memperhatikan motivasi dari keterlibatan tersebut. (Sanit, 1980 : 94).

Sehubungan dengan hal di atas, maka Samuel P. Huntington dan Joane M. Nelson (dalam Sanit 1980 : 98) membedakan partisipasi politik yakni yang bersifat otonom maupun partisipasi politik yang demobilisasi. Dimana masalah niat, dan persoalan yang berkaitan dengannya, yakni motivasi-motivasi politik merupakan hal yang kompleks dan kontroversial sifatnya.

Konsep Masyarakat

Pengertian masyarakat menurut Soekanto S. (2010:28), adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Menurutnya masyarakat pada umumnya mempunyai ciri-ciri dengan kriteria seperti manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain.

Sedangkan menurut Max Weber, pengertian masyarakat merupakan suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya sendiri. Sedangkan Menurut Selo Soemardjan, pengertian masyarakat merupakan orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.

Selo Soemardjan (1964) mengatakan, masyarakat adalah sekumpulan individu yang mengadakan kesepakatan bersama untuk secara bersama-sama mengelola kehidupan.

Menurut Talcott Parson (dalam Soemardjan 1964), masyarakat adalah suatu sistem sosial, dimana semua fungsi prasyarat yang bersumber dan dalam dirinya sendiri bertemu secara tetap. Sistem sosial yang dimaksud adalah terdiri dari pluralitas perilaku-perilaku perseorangan yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan fisik.

Koentjaraningrat (1985 : 146), masyarakat adalah "*kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat terus-menerus dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama*".

Ralph Linton dalam bukunya yang berjudul *Study of Man* mendefinisikan masyarakat adalah "*Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu*".

Mardiasma (2002), mengatakan bahwa selama masa orde baru, harapan yang besar dari masyarakat untuk dapat membangun distrik ke

desanya berdasarkan kemampuan dan kehadaki sendiri ternyata dari tahun ke tahun di rasakan semakin jauh dari kenyataan. Ini disebabkan oleh pola pendekatan sentralistik yang penuh nuansa uniformitas yang dikembangkan. Pemerintah kurang memberi keluasan local kepada masyarakat untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan kemajuan di distrik ke desanya sendiri, sehingga mematikan inisiatif serta kreaktifitas dari masyarakat sendiri. Kondisi yang ada tersebut semakin parah ketika kewenangan yang diberikan kepada kepala distrik selama ini 'untuk mengatur rumah tangganya sendiri tidak disertai dengan pemberian infrastruktur yang memadai, penyiapan sumber daya manusia yang professional, dan pembiayaan. Akibat yang terjadi bukan terciptanya kemandirian suatu desa, tetapi justru itu ketergantungan distrik terhadap pemerintah.

Bertolak dari beberapa pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup sosial yang terdiri dari sekelompok manusia yang saling berhubungan, mempunyai minat serta kepentingan yang sama serta saling mempengaruhi dan membutuhkan dalam suatu kerukunan, dalam ikatan suatu wadah serta memiliki batasan sistem adat sebagai peraturan yang mengikat

Konsep Infrastruktur

Pengertian Infrastruktur

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, infrastruktur dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana umum. Dalam pembahasannya, infrastuktur dapat dikatakan barang publik. *MacMillan Dictionary of Modern Economic* (1996) menyatakan infrastruktur merupakan elemen struktural ekonomi yang memfasilitasi arus barang dan jasa antara pembeli dan penjual. *The Routledge Dictionary of Economics* (1995) mendefinisikan infrastruktur merupakan pelayanan utama dari suatu negara yang dapat menunjang keberlangsungan kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi dengan menyediakan transportasi dan fasilitas pendukung lainnya.

World Bank Report (Bank Dunia, 1994) membagi infrastruktur menjadi tiga golongan;

1. Infrastruktur Ekonomi, merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi finansial, yang meliputi :

- a) Public Utilities, misalnya telekomunikasi, air minum, sanitasi, dan gas.
 - b) Public Works, misalnya bendungan, irigasi dan drainase.
 - c) Transportation Sector , misalnya jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.
2. Infrastruktur Sosial, merupakan aset yang mendukung keahlian dan kesehatan masyarakat diantaranya seperti :
 - a. Kesehatan, misalnya rumah sakit dan pusat kesehatan,
 - b. Pendidikan, misalnya sekolah dan perpustakaan,
 - c. Rekreasi, misalnya taman bermain publik, dll.
 3. Infrastruktur Administrasi, meliputi penegakan hukum, institusi, kontrol administrasi-koordinasi, serta kebudayaan.

Selain itu, Jacobs *et al.*, (1999) membagi klasifikasi infrastruktur menjadi dua :

1. Infrastruktur Dasar (Basic Infrastructure)

Meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan yang mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradable*) dan tidak dapat dipisah-pisahkan baik secara teknik maupun spasial. Contohnya, yaitu jalan raya, kereta api, pelabuhan, drainase, bendungan, dll.

2. Infrastruktur Pelengkap (Complementary Infrastructure)

Seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum. Pengadaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan, ditambah dari kebijakan publik (Canning, 1998). Kebijakan publik memainkan peran yang besar terutama karena ketiadaan dan ketidaksempurnaan mekanisme harga pada pengadaan infrastruktur. Namun peningkatan pengadaan infrastruktur terhadap pendapatan tidak dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas pendapatan dari permintaan, kecuali biaya infrastruktur sama di setiap negara (bagus teguh pamungkas).

Infrastruktur umumnya memiliki karakteristik monopoli alamiah (nature monopoli) karena disebabkan tingginya biaya tetap serta tingkat kepentingannya dalam perekonomian, dan juga pengadaan dan pengoperasian infrastruktur akan lebih ekonomis jika dilakukan oleh satu perusahaan daripada dua atau lebih perusahaan. Nature monopoly biasanya akan muncul bila skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan suatu barang atau jasa sedemikian besar sehingga akan lebih bermanfaat apabila pasokan barang atau jasa diserahkan kepada satu perusahaan saja (Mankiw, 2001). Berdasarkan pengalaman yang telah ada, barang yang termasuk monopoli alamiah akan menyebabkan tingginya intervensi pemerintah untuk pengadaan, baik melalui pengadaan langsung melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur merupakan sektor vital karena berhubungan dengan hajat hidup orang banyak, serta mendukung tercapainya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lama menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu.

Dilihat dari kondisi daerah kabupaten Tolikara secara umum maka tidak mudah membangun daerah ini secara cepat namun pemerintah daerah selalu berfikir semua tantangan kondisi alam terhadap pembangunan infrastruktur. Daerah tersebut sangat jauh dari ibu kota provinsi papua maka hal ini salah satu kendala sulit untuk dijangkau transportasi- transportasi darat sebenarnya merupakan salah satu jenis transportasi yang relatif muda dengan daya angkut yang lebih besar daripada dibandingkan dengan transportasi udara menggunakan pesawat cesna berukuran kecil, oleh sebab itu pemerintah daerah kabupaten tolikara saat ini serius membuka beberapa ruas jalan utama yang menghubungkan pusat pemukiman penduduk dengan pusat pemerintah, pusat perekonomian serta, kota ke distrik dan desa ke desa yang lain disekitarnya. Keadaan jalanan yang terdapat di kabupaten tolikara masih berupa jalan tanah (jalan setapak), dan jalan tanah yang di perkeras (jalan japat) jaringan jalan japat yang terdapat saat ini mampu dilewati kendaraan jenis roda empat yaitu; artop, truk dan mobil Hilux. Kendaraan lain seperti mobil avanza tidak bias menggunakan karena kondisi jalan ini belum layak untuk menggunakan walaupun ada satu-satu sedang menggunakan.

Kata atau istilah Pembangunan telah menjadi bahasa dunia. Hasrat bangsa-bangsa untuk mengejar masa depan yang lebih baik menurut kondisi dan cara masing-masing, melahirkan berbagai konsep yang berkaitan dengan konsep pembangunan, seperti pertumbuhan (growth), modernisasi (modernization), rekonstruksi (reconstruction), perubahan sosial (social change), pembaharuan (innovation), dan lain-lainnya.

Pengertian dan definisi mengenai pembangunan telah banyak dikemukakan dalam berbagai literatur kepustakaan. Definisi yang diberikan pada kata pembangunan seringkali berbeda-beda, tergantung dari sudut pandang ilmu masing-masing.ada pendapat yang mengatakan bahwa era pembangunan adalah pertumbuhan; pembangunan adalah ketergantungan antar manusia; pembangunan adalah konsep berpikir; pembangunan adalah usaha untuk mengurangi/meniadakan orang miskin; pembangunan adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan bukan pemenuhan keinginan; pembangunan adalah proses penentuan tujuan alokasi dana, dan penggunaan dana tersebut dengan efektif; pembangunan adalah usaha masyarakat untuk memperbaiki kehidupan dan penghidupannya; pembangunan adalah proses untuk mencapai kehidupan manusia yang adil dan makmur; pembangunan adalah cara untuk mencapai manusia seutuhnya; bahkan pembangunan yang diartikan sebagai wadah untuk melakukan korupsi bagi orang yang tamak dan mementingkan diri sendiri

Pengertian atau definisi pembangunan yang netral dikemukakan oleh penulis-penulis, antara lain oleh Saul M. Katz (dalam Tjokrowinoto, 1987) yang mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang terencana dari suatu. situasi nasional yang satu ke situasi nasional yang lain yang dinilai lebih baik. Definisi lain dikemukakan oleh Michael Todaro (dalam Bryant & White, 1985) bahwa pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang menyangkut reorganisasi dan reorientasi sistem. ekonomi dan sistem, sosial secara keseluruhan; yaitu disamping peningkatan

pendapatan dan output, juga menyangkut perubahan radikal struktur kelembagaan, struktur sosial, serta struktur administratif, dan perubahan sikap, adat kebiasaan serta kepercayaan. Definisi yang agak mirip juga dikemukakan oleh Ferroux (dalam Goni, 1984) bahwa pembangunan adalah perpaduan antara perubahan sosial dan mental di dalam masyarakat yang memungkinkan produk nyata masyarakat yang bersangkutan meningkat atau berkembang secara kumulatif dan berlangsung terus menerus.

Dari pengertian atau definisi tersebut di atas dapat dilihat bahwa pembangunan merupakan suatu konsep yang luas dan bahkan rumit, sehingga memunculkan interpretasi yang berbeda dan bahkan bertentangan satu sama lainnya. Suatu hal yang dapat disimpulkan bahwa inti daripada pembangunan itu pada hakekatnya adalah perubahan, yaitu keinginan untuk merubah apa-apa yang lama atau yang kurang bernilai menuju ke nilai-nilai baru yang dinilai lebih baik secara terencana. Tujuan pembangunan tidak lain adalah untuk perbaikan kondisi kehidupan bangsa atau masyarakat ke arah yang lebih baik; dengan kata lain adalah untuk kesejahteraan seluruh masyarakat bangsa.

Dari segi peristilahan dalam kepustakaan ditemui beberapa istilah yang mengandung arti pembangunan, antara lain "rural development", "village development", "community development", dan lain-lain. Dalam kepustakaan Indonesia juga ditemui beberapa istilah seperti "pembangunan masyarakat" atau "pembangunan masyarakat".

Definisi pembangunan yang diterima luas telah dikemukakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, 1956). Setelah melalui studi yang lama di berbagai negara, PBB mendefinisikan pembangunan masyarakat adalah proses dimana usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan dipadukan dengan wewenang pemerintah, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat, dan memungkinkan mereka untuk memberi sumbangan kepada kemajuan nasional (Bhattacharyya, dalam Goni, 1984). Definisi tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh T.R. Betten (1960) yang mengemukakan bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat membahas dan merumuskan kebutuhan mereka, merencanakan usaha pemenuhannya, dan melaksanakan rencana itu sebaik-baiknya (dalam Surjadi, 1979).

Dari pengertian pembangunan yang diuraikan di atas dapat dilihat bahwa ciri utama dari pembangunan adalah penekanannya pada inisiatif atau prakarsa masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa partisipasi masyarakat itu sendiri sebagai elemen utama terselenggaranya atau berhasilnya usaha pembangunan.

Peran Kepala Distrik Sesuai Dengan Regulasi

Kebijakan sesuai undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua dan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara structural, fungsional maupun cultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah

satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyengket kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrali, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas dekosentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, camat atau kepala distrik dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Tugas pokok dan fungsi kecamatan diatur dalam peraturan daerah kota nomor 13 tahun 2008. Distrik merupakan wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat atau kepala distrik yang kedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Camat atau kepala distrik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menanganin sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tungan umum pemerintahan. Dalam penyelenggarakan tungan pokoknya. Camat atau kepala distrik mempunyai fungsi: pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat intuk iut mensukseskan pembangunan dilingkup kecamatan, sekaligus. Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan di wilayah baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

Tugas Pokok dan Fungsi Distrik

Kepala distrik menurut **Bayu Suryanigrat** (1981:2), adalah seorang yang mengempalai dan Pembina wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa kampung/kelurahan. Kepala distrik juga seorang esekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah/distrik menurut yaitu pengendalian pembangunan.

Disamping itu juga kepala distrik menurut peraturan nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah menyebutkan bahwa:

- a. Distrik merupakan wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- b. Kepala distrik mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan bupati/walikota untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah,
- c. Kepala distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undang.
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umu.
 5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat distrik.
 6. Membina penyelenggaraan pemerintahan kampung/kelurahan ditingkat distrik.

7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dilaksanakan pemerintahan kampung/kelurahan.
- d. Pelimpahan wewenang sebagai bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- e. Distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik
- f. Kepala distrik berkendudukan dibawah dantanggung jawab kepada bupati/walikota melalui secretariat daerah.
- g. Pedoman organisasi distrik ditetapkan dalam peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penggunaan aparatur Negara.

Demikian dengan pasal (15) menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang distrik/camat.

Dalam keputusan menteri dalam negeri nomor 158 tahun 2004 tentang pedoman organisasi kecamatan menyebutkan bahwa kepala distrik atau disebut camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sadu Wasistiono, Ismael Nurdin Dan M. Fahrurosi 2009 bahwa:

- a. Bidang pemerintahan
- b. Bidang pembangunan dan ekonomi
- c. Bidang pendidikan dan kesehatan
- d. Bidang social dan kesejahteraan
- e. Bidang pertanian.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. (Moleong 1996), dengan fokus penelitian Partisipasi Politik Masyarakat sebagai variabel bebas dan atau Pembangunan Infrastruktur sebagai variabel terikat atau dependen. Dengan demikian secara operasional dapat diuraikan sebagai berikut : Partisipasi politik, adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam kehidupan politik baik itu berlaku dalam pengambilan keputusan pemerintah, proses pemilihan umum, serta aktivitas politik lainnya. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu melalui observasi/pengamatan, wawancara dan study dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Distrik Kagime

a. Pelayanan Public Di Bidang Kesehatan

Ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan salah satu tanggung jawab negara terhadap penduduknya. Majunya infrastruktur kesehatan suatu daerah akan membuat penduduk di daerah tersebut dapat dengan mudah menjangkau pelayanan kesehatan yang baik ketika

membutuhkan. Mudah-mudahan masyarakat menjangkau pelayanan kesehatan akan membuat kesehatan masyarakat selalu dalam kondisi yang prima, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu akibat banyaknya masyarakat yang terserang penyakit karena tidak mendapat penanganan medis. Selanjutnya dengan tersedianya infrastruktur kesehatan yang mencukupi, ketahanan kesehatan masyarakat akan terjaga, implikasinya produktivitas masyarakat akan bertambah semakin tinggi tiap tahunnya seiring bertambahnya jumlah penduduk. Produktivitas masyarakat yang semakin tinggi inilah secara nasional akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut kepala puskesmas Distrik Kanggime kondisi sarana dan prasarana kesehatan di distrik Kagime sudah cukup baik namun tenaga kesehatan atau tenaga medis masih kurang. Hal itu terbukti karena banyak pasien masuk namun karena tenaga medis maka sangat sering tidak dapat terlayani dengan baik.

b. Infrastruktur Di Sektor Pendidikan

Infrastruktur pendidikan merupakan merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak bagi distrik Kanggime. Hal itu terkait dengan pengembangan Sumber Daya Manusia yang ada di Distrik Kanggime. Sekolah di wilayah ini sudah ada namun bangunannya masih berupa rumah kayu yang atapnya ditutupi dengan rumput / alang-alang, akibatnya jika turun hujan seringkali proses belajar mengajar menjadi terganggu.

Selain itu untuk tenaga pendidik masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah khususnya pemerintah daerah. Misalnya tempat tinggal bagi mereka.

c. Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pentingnya pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipungkiri. Di distrik Kanggime keberadaan infrastruktur ini masih bermasalah. Padahal wilayah ini banyak masih memiliki warga yang tinggal di pedalaman dan kehidupan utamanya dari hasil pertanian. Dalam memasarkan hasil pertaniannya mereka sering terkendala dengan kondisi jalan yang mereka lewati. Namun perhatian pemerintah daerah terkait permasalahan ini masih kurang.

d. Infrastruktur Tenaga Listrik

infrastruktur tenaga listrik di Distrik Kanggime dapat dikatakan sangat minim. Masyarakat di wilayah ini masih terbiasa dengan kehidupan yang tanpa tersedianya tenaga listrik. Akibatnya berbagai kegiatan yang khususnya yang dapat menunjang kegiatan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat meningkat menjadi problem yang besar bagi masyarakat di Distrik Kanggame.

e. Infrastruktur Angkutan Umum

Keberadaan angkutan umum memiliki peranan penting dalam pembangunan perekonomian. Di distrik Kanggime transportasi umum masih menjadi masalah besar karena mahal dan jumlahnya yang terbatas. Hal ini

disebabkan karena banyak kampung-kampung di Distrik Kanggime terletak di wilayah-wilayah yang terpencil. Warga masyarakat banyak yang mengeluh terkait kondisi angkutan umum di wilayah ini. Karena Angkutan umum merupakan elemen yang penting dalam perekonomian karena berkaitan dengan distribusi barang, jasa, dan tenaga kerja, serta merupakan inti dari penggerak ekonomi mereka.

Problematika Partisipasi Masyarakat Di Distrik Kanggime

Minimnya partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah diakibatkan karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap para pemimpin yang terpilih. Karena berdasarkan keterangan yang diperoleh selama penelitian, para informan mengatakan bahwa banyak pejabat yang pada saat terpilih melupakan semua janjinya yang diberikan pada saat kampanye.

Bahkan menurut beberapa informan ada pejabat yang justru menyalahgunakan dana pembangunan yang diberikan oleh pusat untuk digunakan bagi kepentingan pribadi. Namun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya, kemajuan pembangunan infrastruktur kebutuhan masyarakat di Distrik Kanggime banyak terbengkalai atau belum memadai.

Selain itu problematika pembangunan infrastruktur di Distrik Kanggime menurut beberapa informan disebabkan karena banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terpilih tidak berasal dari wilayah Distrik Kanggime sehingga aspirasi masyarakat di wilayah ini menjadi kurang terwakili.

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan tentu saja bisa dilakukan melalui kepala suku adat kepada pembuatan kebijakan dalam hal ini lembaga legislatif untuk kerja sama, namun selama ini sidang paripurna dilakukan diluar wilayah kerja sehingga masyarakat bersikap tidak peduli terhadap pada kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah. Selain itu sangat sering terjadi program yang ditetapkan sangat berbeda jauh dengan kebutuhan sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini berdampak pada keperdulian masyarakat untuk turut berpartisipasi. Penyebab lain ialah pembangunan relasi atau pendekatan komunikasi antara tokoh masyarakat atau kepala suku adat dan pemerintahan daerah kurang berkesinambungan maka dalam penyampaian aspirasi masyarakat bagi kebutuhan infrastruktur tidak berjalan mulus.

PENUTUP

Kesimpulan

Rendahnya tingkat keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Distrik Kanggime disebabkan karena menurunnya tingkat kepercayaan kepada para pejabat kepala daerah serta para wakil mereka yang duduk di kursi legislative, karena mereka sering merasa dibohongi. Selain itu sangat sering terjadi program yang ditetapkan sangat berbeda jauh dengan kebutuhan riil dari masyarakat, yang akibatnya mereka menjadi enggan untuk berpartisipasi.

DAFTAR PUSAKA

- Arbi, Sanit, 1980. *Sistem Politik Indonesia, Penghampiran, dan Lingkungan. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.*
- Betten, T.R., 1979, *Pembangunan Masyarakat* terjemahan Surjadi, Bandung : Alumni.
- Bryant Louise dan Coralie White, 1985. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara-Negara Berkembang* (terjemahan), Jakarta: LP3ES.
- Budiardjo Miriam, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta.*
- Denny J. A, 1999, *Visi Indonesia Baru Setelah Gerakan Reformasi 1998*, Jakarta.
- Farchan, Buklin, 1988. *Analisis Kekuatan Sosial Politik di Indonesia*. LP3ES, Jakarta.
- Haryanto, 1992. *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum* .Liberty, Yogyakarta.
- Mac Millan. 1996. *Dictionary of Modern Economic The Roudge Dictionary of Ecomics*.
- Mustakir P,W. 1994. *Memahami Kembali Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta.
- Nasaruddin .S. 1993. *Dinamika sistem Politik indonesia*. Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ndraha, T. 2011. *“Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)”*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Poerbopranoto K. 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*. Eresco.Bandung.
- Selo Sumarjan, 1964, *Setangkai Bunga Sosilogi; Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. 2010. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*. Penerbit PT Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Sukarna. 1991 *Analisa Politik, Mandar Maju*, Bandung.
- Sutrisno H. 1989. *Metodologi Penelitian Sosial*. PT Gramedia, Jakarta
- Talizudhu N.1987. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta : Bina Aksara